

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Afandi, Ali, 1997, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Cetakan Keempat, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jum Aggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 1982, *Sejarah Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- R. Setiawan, 1978, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Ronny Hanityo Sumitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, Cet. Ke-8, Bandung.
- Sudarwan Danim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.
- Thomas Suyatno, dkk, 1997, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara.

### **C. Jurnal**

Abdul Hamid, 2011, "Otonomi Daerah Dan Kualitas Pelayanan Publik", Jurnal *Academica Fisip Untad* Vol. 03 No. 01, Universitas Tadulako.

Arfa'i, "Bentuk Negara Republik Indonesia Ditinjau Pengaturan tentang Pemerintah Daerah dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal*, Universitas Jambi.

Dwi Ratnasari, 2015, "Manajemen Aset Daerah melalui Pengamanan Barang Milik Daerah pada Aset Tidak Bergerak di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya", *Jurnal Publika* Vol. 3 No. 5, Universitas Negeri Surabaya.

Mulada, Diman Ade, 2013, "Peran Bank Garansi Dalam Kontrak Konstruksi Antara Pemerintah Dengan Kontraktor", *Jurnal IUS* Vol. I Nomor 2, Universitas Mataram.

- Runiawati, Nunung, 2017, “Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Suatu pendekatan teoritis dan praktis dalam menentukan metode pemanfaatan aset)”, *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, Vol. 1 No. 1, Universitas Padjajaran.
- Taufiq El Rahman, 1999, “Perjanjian BOT (Build Operate and Transfer) Konsep, Praktek, dan Perkembangannya di Indonesia”, *Mimbar Hukum, Nomor 32/VI, 123-131*, Universitas Gadjah Mada.
- Urip Santoso, 2014, “Perjanjian Bangun Guna Serah Antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perseroan Terbatas”, *Mimbar Hukum Volume 26 Nomor 1 Februari 2014*, Departemen Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya
- Wijayanti, Septi Nur, 2016, “Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No. 2, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **D. Skripsi dan Tesis**

- Ardiansyah Putra, 2012, “Analisis Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun”, *Tesis*, Universitas Sumatera Utara.
- Miftah Muhaimin, 2019, “Pengawasan Peredaran Rokok Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Risma, Andi, 2017, Pemanfaatan Barang Milik Negara Idle Dalam Bentuk Sewa Menyewa Sebagai Upaya Penerimaan Negara Bukan Pajak, Disertasi, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Turhindayani, 2017, Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah), Tesis, Universitas Gadjah Mada.
- Utami, Yustina Puji, 2017, Pelaksanaan Perjanjian Bangun Guna Serah Obyek Wisata Taman Rekreasi Kalibening Antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan PT Trisna Wahida Utama, Skripsi, Universitas Gadjah Mada.
- Yuliani, Yuyun, 2017, Analisis Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah Pada Kabupaten Boyolali, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

### **E. Modul**

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, “Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah”, Jakarta.

Rahmat Guntoro, Tanda Setya, 2010, “Modul Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Barang Milik Daerah”, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

### **F. Internet**

KBBI Daring, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/otonomi%20daerah> pada 15 Juni 2020

BPKAD Kota Semarang, diakses dari <https://simanggaran.semarangkota.go.id/> pada Jumat, 18 September 2020